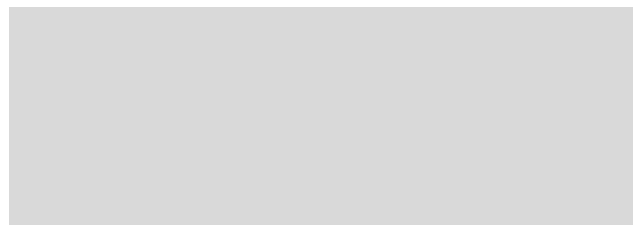




# LAPORAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021





## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021.

Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan, di mana salah satunya memuat perihal kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala, termasuk Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik yang sudah dilaksanakan PPID Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2021.



## PENDAHULUAN

Memasuki tahun ke-14 berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia, tampak nyata bahwa informasi menjadi elemen penting dalam kehidupan. Masyarakat semakin aktif mencari, mengolah dan membagikan informasi yang dianggap bermanfaat bagi kehidupannya.

Apalagi saat pandemi global masuk ke tanah air di awal 2020, setiap orang terpaksa tetap tinggal di rumah. Bermodalkan gawai, masyarakat dapat mencari informasi apa yang terjadi di dunia luar. Oleh karena itu, salah memilih sumber informasi membuat masyarakat terhisap hoaks yang menggiring pada pemahaman yang salah, ketakutan, dan perpecahan.

Melalui PPID, setiap badan publik memiliki wadah untuk menyebarkan informasi yang valid dan up-to-date. Pentingnya tugas dan tanggung jawab menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Ketenagakerjaan.

## DASAR HUKUM

Sejak tahun 2019 berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan ini menyempurnakan sekaligus mencabut peraturan-peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan



## SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan informasi publik oleh PPID di Kementerian Ketenagakerjaan, yang di Kemnaker diselenggarakan oleh para dibentuk berdasar Keputusan Sekretaris Jenderal Kemnaker RI Nomor 1/0123/HM.09/I/2021 tentang pada Bagian Pelayanan Informasi Publik, Sub Bagian Layanan Informasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengaduan. Pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan didukung oleh Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi Kementerian PPID yang terdiri dari perwakilan setiap Ketenagakerjaan Tahun 2021. unit eselon I

## ANGGARAN DAN BIAYA

Biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan PPID dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kemnaker TA 2020 No. 026.01 .1.450938/2021 tanggal 23 November 2020

## SARANA & PRASARANA

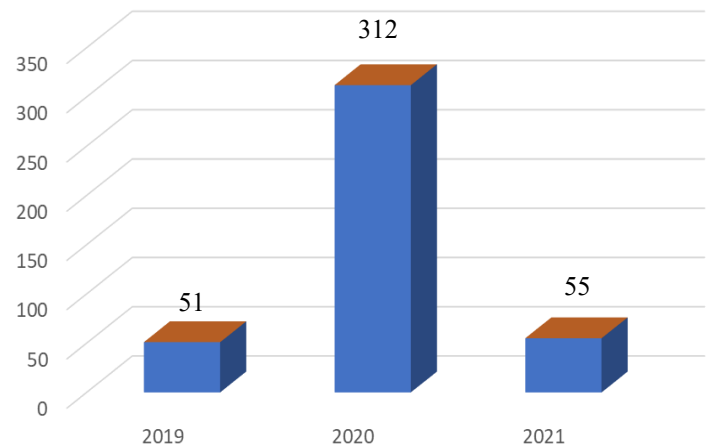
Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi di Kementerian Ketenagakerjaan disediakan Help Desk PPID di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Ketenagakerjaan, lantai I Gedung B Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, dan layanan tanpa tatap muka melalui:

- (1) laman [ppid.kemnaker.go.id](http://ppid.kemnaker.go.id);
- (2) akun Instagram [ppid.kemnaker](https://www.instagram.com/ppid.kemnaker);
- (3) nomor WhatsApp 08119521150 dan 08119521151;
- (4) call-center 1500630; dan
- (5) alamat surat elektronik [ppid@kemnaker.go.id](mailto:ppid@kemnaker.go.id).

Namun memasuki masa pandemi seluruh layanan dialihkan menjadi layanan tanpa tatap muka.

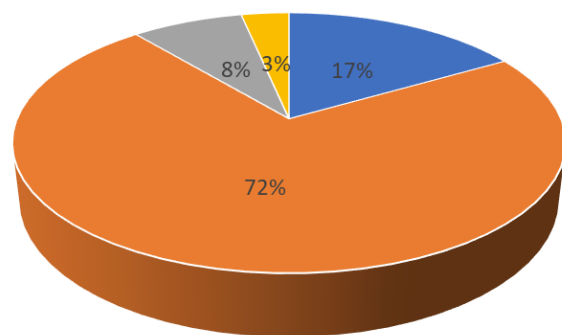
## PERMOHONAN INFORMASI

Selama tahun 2021, Sub Bagian LIP melayani 55 (lima puluh lima) orang Pemohon Informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon Informasi dikelompokkan berdasar jenis kelamin, kelompok usia, pekerjaan, dan unit Eselon I yang menguasai informasi.

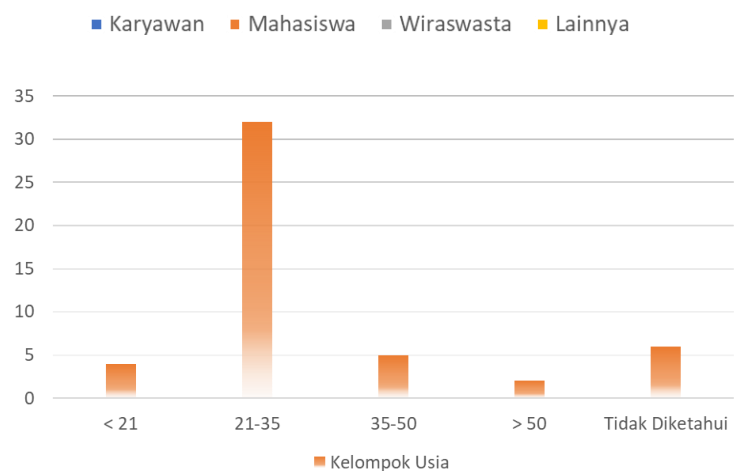


### Data Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Menurut pekerjaan, 72% pencari informasi berasal dari kelompok Mahasiswa, disusul Karyawan 17%. Sementara pemohon informasi yang berwiraswasta ada 4,8%, dan 3,2% lainnya.

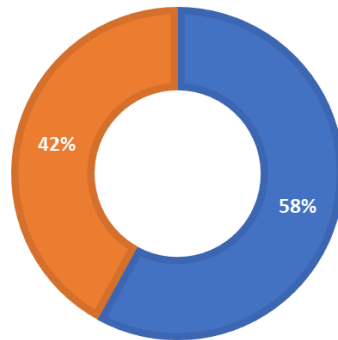


Berdasarkan Usia, 65% atau 32 (tiga puluh dua) pemohon informasi berasal dari kelompok masyarakat usia 21 s.d. 35 tahun, dan 10% atau 5 (lima) orang berasal dari kelompok usia 36 s.d. 50 tahun. Sementara ada 4% atau 2 (dua) orang berusia di atas 50 tahun, serta 8% atau 4 (enam) orang berusia di bawah 21 tahun.



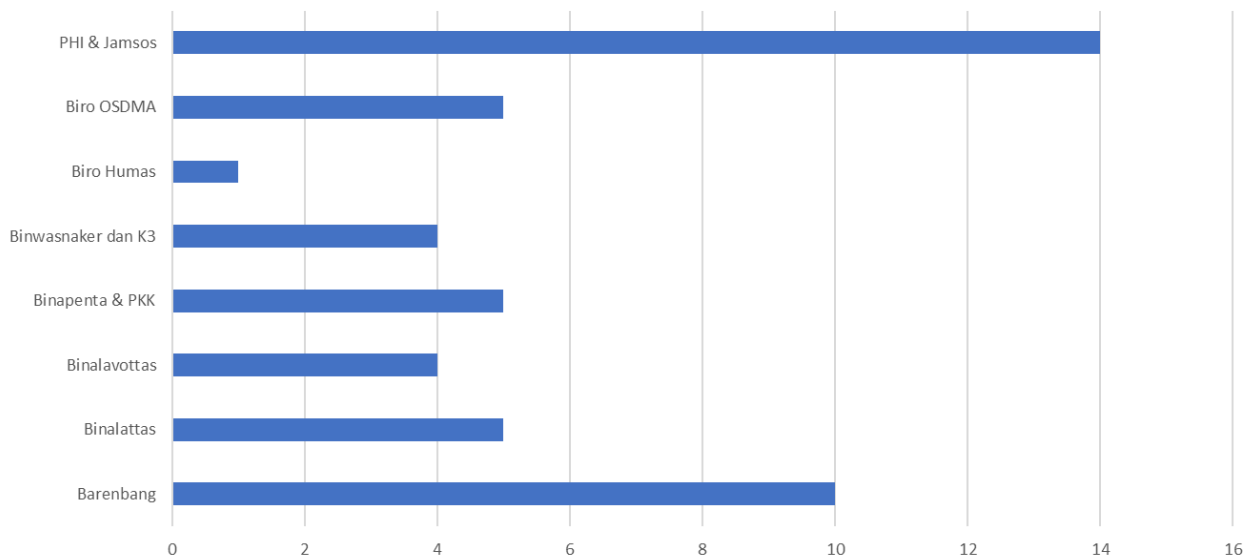
## Data Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pemohon informasi berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 58%, dan 42% Pemohon Informasi adalah Perempuan



■ Laki-Laki ■ Perempuan

Setiap permohonan informasi dikategorikan berdasar Unit Eselon I yang menguasai informasi. Masalah Ketenagakerjaan yang ditangani meliputi topik-topik sebagai berikut:



<b>TOPIK</b>	
<b>BINALATTAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Prakerja</li> <li>2. Informasi pendaftaran LPK</li> <li>3. Informasi Balai Latihan Kerja (BLK)</li> <li>4. Data penerima kartu prakerja, Masyarakat desa saya. Desa Mojowarno, kec. Kaliori, kab. Rembang, Jateng. Kode desa 33.17.2016</li> <li>5. Kebijakan dan Program Kementerian Ketenagakerjaan terhadap penyandang disabilitas dalam kesempatan kerja (2017-2020)</li> <li>6. Strategi sosialisasi kebijakan BLK</li> <li>7. Peserta Vokasi dan lulusannya</li> </ol>
<b>TOPIK</b>	
<b>BINAPENTA &amp; PKK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi</li> <li>2. Perpanjangan IMTA</li> <li>3. proposal inkubasi bisnis</li> <li>4. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Merespon Perubahan Kebijakan Keimigrasian Jepang Tahun 2018</li> <li>5. Tata cara proses mengirim TKW ke luar negeri untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di singapura</li> <li>6. pengurusan perizinan TKA online</li> <li>7. Tenaga Kerja Sukarela (TKS)</li> <li>8. Pidato Menaker terkait ABK Indonesia di Kapal Taiwan</li> <li>9. Data pekerja asing dari Filipina dari tahun 1948-2019</li> <li>10. Salinan dokumen Perjanjian Kerjasama Penempatan PPTKIS PT. Crystal Biru Meuligo (CBM) dengan pengguna jasa di Negara Mesir pada tahun 2008</li> <li>11. Perjanjian Penempatan TKI atas nama Juleha dengan PPTKIS PT. Crystal Biru Meuligo (CBM)</li> <li>12. Perjanjian kerja TKI atas nama Juleha dengan pengguna jasa TKI di Mesir</li> <li>13. Laporan perubahan kepemilikan atau kepengurusan PT. Crystal Biru Meuligo (CBM) dari pengurus baru</li> <li>14. upaya Pemerintah Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja ke Jepang</li> <li>15. Data kebijakan dan program kementerian terhadap penyandang disabilitas dalam kesempatan kerja</li> <li>16. data mengenai jumlah lapangan kerja di wilayah Jawa Timur</li> <li>17. Jumlah penduduk yang bekerja (angkatan kerja) pada tingkat kelurahan/desa di wilayah Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya</li> <li>18. Prosedur untuk penempatan karyawan di cabang luar negeri</li> <li>19. Peran apa saja yang telah dilakukan IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia di Benjina, Indonesia pada tahun 2015-2017</li> <li>20. Peran Pemerintah Indonesia dalam Pembebasan Hukuman Mati TKI di Arab Saudi (Studi Kasus Satinah 2011-2015)</li> <li>21. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dalam triwulan Tahun 2000-2019, berdasarkan kelompok skilled dan Unskilled serta Negara asal TKA</li> <li>22. Prosedur izin LPTKS AKAD untuk perusahaan</li> <li>23. Tenaga Kerja Informal</li> <li>24. Data Pekerja Informal di Sektor Pertanian</li> <li>25. Human Trafficking PMI Malaysia</li> <li>26. Program JPS Pekerja Informal di Sektor Pertanian</li> </ol>



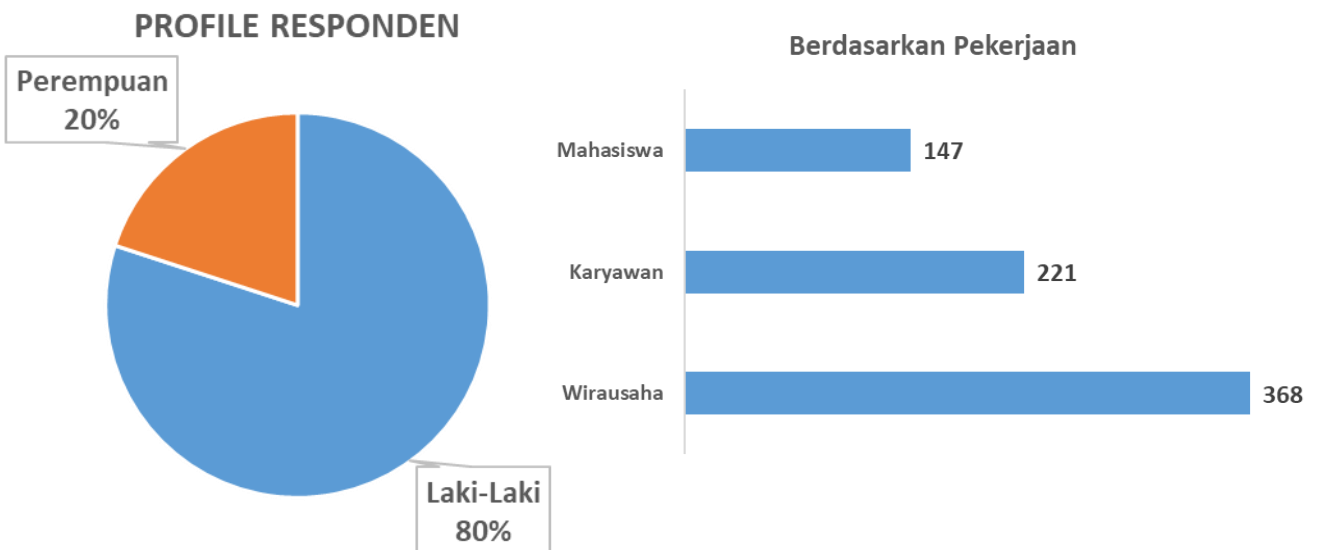
<b>PHI &amp; JAMSOS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurusan PP&amp;PKB</li> <li>2. THR</li> <li>3. Pembayaran Upah terlambat</li> <li>4. Data PHK akibat COVID-19</li> <li>5. Diaspora Peduli</li> <li>6. Klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</li> <li>7. PHK Sepihak</li> <li>8. Jumlah konfederasi, federasi, serikat pekerja, dan jumlah pekerja yang bergabung menjadi anggota serikat dari tahun 2013-2019</li> <li>9. Jumlah kasus mogok kerja, mogok kerja yang dilakukan oleh konfederasi, jumlah pekerja yang terlibat dalam mogok kerja, dan jumlah jam kerja hilang</li> <li>10. Data Forecasting Jumlah Pekerja yang di PHK dan dirumahkan sampai Desember 2020, Forecasting Jumlah Pengangguran sampai Desember 2020</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. UMR dan UMP seluruh Indonesia 2010-2019</li> <li>12. Pesangon</li> <li>13. Pensiun</li> <li>14. Data PHK akibat digitalisasi mesin (2015-2020)</li> <li>15. Bantuan Subsidi Upah</li> <li>16. Aturan jam kerja dan istirahat</li> <li>17. Outsourcing</li> <li>18. Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>19. BPJS</li> <li>20. UMK</li> <li>21. Data SP/SB</li> <li>22. Data Jumlah Pekerja</li> <li>23. Data Pengaduan</li> </ol>
<b>BINWASNAKER &amp; K3</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WLKP</li> <li>2. Perizinan K3/SIO</li> <li>3. Women trafficking</li> <li>4. status sertifikasi K3 Eidikos International di Kemnaker</li> <li>5. Protokol COVID-19</li> </ol>
<b>Setjen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magang</li> <li>2. Operasional PTSA</li> <li>3. Data sesuai DIP</li> <li>4. Legal Opinion</li> <li>5. Status/verifikasi dalam sistem web PPID</li> <li>6. Risalah pembahasan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>7. Dokumen DIPA induk dan pastikan kemnaker tahun 2020</li> <li>8. Renja kemnaker 2020</li> <li>9. Renstra kemaren 2020-2024</li> <li>10. RKA Kemnaker 2020</li> <li>11. Legalisir Paklaring</li> <li>12. Formasi CPNS</li> <li>13. Pengembangan SDM</li> </ol>
<b>BARENBANG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data PHK akibat COVID-19</li> <li>2. Pendataan Perusahaan terhadap dampak COVID-19</li> <li>3. onfirmasi survey dari Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan</li> <li>4. Kendala akun Sisnaker</li> <li>5. Data TKA</li> </ol>

## SURVEI LAYANAN INFORMASI

Untuk meningkatkan kinerja dalam penyediaan informasi publik, PPID Kemnaker melakukan survei kepuasan terhadap pemohon informasi selama tahun 2021. Survei didistribusikan melalui 4 (empat) media resmi PPID yaitu website, email, instagram dan whatsapp.

### PROFIL RESPONDEN

Ada 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) responden yang mengikuti survey. 80%-nya adalah laki-laki dan 20%-nya adalah perempuan.



Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 50% responden adalah wirausaha, 30% responden adalah karyawan. Sedangkan 20% responden merupakan pelajar atau mahasiswa.

### KINERJA PETUGAS

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menilai tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan informasi publik pada kategori baik.

Untuk survei terhadap pengetahuan dan penguasaan materi, mayoritas responden menilai petugas data dan informasi publik dalam kategori baik.

## PELAYANAN PPID

Berdasarkan persyaratan pelayanan, mayoritas responden menilai dalam kategori baik. Untuk alur mekanisme pelayanan, mayoritas juga dalam kategori baik. Sedangkan berdasar ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan informasi publik, mayoritas responden memberi nilai dalam kategori baik.

### KENDALA EKSTERNAL

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID Kementerian Ketenagakerjaan menghadapi kendala dalam mengelola Permohonan Informasi. Masih ada permohonan yang ditolak karena Pemohonan Informasi tidak dapat melengkapi persyaratan yang diminta oleh petugas

### KENDALA INTERNAL

Kendala internal yang paling utama adalah menjaga komitmen masing-masing unit dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh, petugas PPID masih menghadapi kesulitan saat berkoordinasi dengan unit teknis dalam memenuhi permohonan. Hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi yang dimohonkan.

Di samping itu, belum ada kesadaran untuk melakukan pemutakhiran informasi secara mandiri dari unit teknis untuk dilaporkan kepada PPID. Pemutakhiran umumnya baru dilakukan apabila diminta oleh petugas.

## PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 disusun sebagai bahan perbaikan dan evaluasi kinerja.

Jakarta, 18 Mei 2022

ttd.

Chairul Fadhly Harahap  
Kepala Biro Humas/PPID Utama